

Thursday, 08 December 2005
Opini Publik

Memahami Sabda Sang Raja

Oleh : HM Nasruddin Anshoriy Ch

JIKA kita cermati secara seksama, terutama yang berkaitan dengan rencana sejumlah pembangunan di kota Yogya, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DIY maupun Pemerintah Kota Yogya, seperti pembangunan mall, mega mall, super mall, pasar induk, terminal, bandara, serta apa saja yang pada gilirannya akan mengubah wajah Yogya, senantiasa membuahkan wacana publik, debat yang menyegarkan, serta ajang diskusi dan pembelajaran bagi semua.

Sekecil apapun permasalahannya, akan mendapatkan reaksi dari berbagai kalangan. Apalagi persoalan-persoalan besar yang menyangkut warisan sejarah, tradisi leluhur, harta karun budaya, nilai-nilai spiritual dan seterusnya, sudah barang tentu menimbulkan pro kontra yang tak habis-habis. Ditambah lagi dengan berbagai argumen ilmiah, seperti konsep tata ruang, pelestarian cagar budaya, heritage dan analisis dampak lingkungan, maka persoalan demi persoalan akan semakin memperkaya wacana dan pembelajaran bagi kita semua.

Hal yang sama terjadi pada Rencana Pembangunan Pusat Parkir dan Pertokoan Bawah Tanah di Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta. Ketika Pemkot Yogyakarta melemparkan gagasan itu kepada publik beberapa waktu lalu dengan menggandeng pihak luar selaku investor, maka publik pun langsung menyambarnya dengan cepat dan debat wacana pun marak terkait masalah tersebut. Berbagai sudut pandang dikemukakan dan sejumlah argumen meluncur, baik dari para pakar dalam perspektif ilmiah, para seniman dan budayawan dalam perspektif kebudayaan, para birokrat dalam perspektif proyek, para pengusaha dalam perspektif pasar, para wakil rakyat dalam perspektif check and balance, wong cilik dalam perspektif mata pencaharian serta para kerabat Kraton Yogyakarta pun turut pula meramaikan.

Pertanyaannya, apa yang sesungguhnya terjadi dengan warga Yogya? Jawabannya tentu tidak sederhana. Tapi bagi saya, setiap polemik, setiap wacana, setiap ide dan pendapat, harus dimaknai sebagai pembelajaran demokrasi. Mungkin di propinsi-propinsi lain tidak semeriah Yogya dalam merespons dan menyikapi berbagai permasalahan publik. Pemerintah sudah jelas tidak bisa lagi memonopoli kebenaran, demikian pula para wakil rakyat. Kebenaran harus dicari dan dirumuskan secara bersama-sama seluruh warga masyarakat.

Selalu saya sampaikan kepada teman-teman di Jakarta setiap kali mereka beratnya tentang Yogya. Apa kabare Yogya? Maka jawab saya: “Eng atas Yogya, di mana Kraton dan Raja tetap sebagai simbol budaya, yang sejak dahulu kala dicap sebagai feodal, kok begitu terbuka dan transparan dalam mengelola setiap agenda pembangunan”. Artinya apa? Bahwa dari Yogyakarta telah tumbuh semangat dan perilaku demokratis, terbuka,

dialogis, sehingga menutup berbagai kemungkinan kepada para birokrat pemerintah untuk menjalankan roda pelayanan publik dengan cara mau menang sendiri.

Terkait masalah Rencana Parkir Bawah Tanah di Alun-alun Utara, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengirim sms pada saya tanggal 27 November 2005 pukul 10.17 WIB yang berisi sebagai berikut: “Coba dilempar isu, jika Alun-alun dan Kraton sebagai heritage, kalau ada parkir di bawahnya apa mengubah fungsi serta kawasan heritage itu atau tidak? Yang setuju atau tidak pertimbangannya apa? Logika? Perasaan? Atau keduanya? Kenapa di Masjid Haram di kota suci Makkah sana di bawah areal Ka’bah ada tempat parkir dan pertokoan? Juga di bawah Masjid Nabawi di Madinah?”

Pada tanggal yang sama, pukul 10.23 WIB, sms berikutnya dari Ngarso Dalem saya terima. Bunyinya: “Kalau masalah teknis dan lingkungan pasti memenuhi persyaratan. Pandangan saya, bagaimana masyarakat dan para pakar melihat dan berbicara dengan logika rasional melihat tantangan masa depan. Yogyakarta itu jauh ke masa depan mau seperti apa? Selain itu, saat ini Alun-alun kotor dan kumuh. Kalau dipindah ke bawah kan jadi bersih. Apa masyarakat dan para pakar sudah memikirkan?” Menarik untuk dicermati apa yang disampaikan oleh Sang Raja Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut. Selain melemparkan pendapatnya, beliau juga mengajak semua kalangan untuk berdialog secara terbuka dengan logika yang jernih dan suasana kebatinan maupun perasaan yang tanpa sikap emosional serta memaksakan kehendak. Sebagai Raja, sebagai Gubernur, sebagai pribadi, Sri Sultan mengajak setiap warga masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya. Menurut saya, langkah ini merupakan langkah elegant bagi upaya pembelajaran demokrasi. Menebar wacana untuk membuahakan demokrasi. Luar biasa.

GBPH Joyokusumo sendiri ketika saya konfirmasi masalah tersebut mengatakan bahwa gagasan Rencana Parkir Bawah Tanah di Alun-alun Utara tersebut dilontarkan oleh Pemerintah Kota dan bukannya oleh Pemerintah Propinsi, Gubernur atau Sri Sultan sebagai Raja. Dijelaskan oleh Gusti Joyo, bahwa pihak Kraton Ngayogyakarta sendiri belum secara resmi menanggapi masalah tersebut. Tapi wacana yang muncul dari kerabat Kraton, bahwa Alun-alun dan Masjid Agung termasuk kawasan keprabon yang memang sarat bernuansa spiritual dan budaya. “Terhadap masalah ini, biarlah Pemkot Yogya yang menjelaskan kepada publik,” tegas Gusti Joyo.

Yang jelas, debat publik terhadap persoalan ini cukup produktif dalam perspektif pembangunan demokrasi dan dalam kerangka good governance. Hasil akhirnya nanti, jelas tidak semudah membalik telapak tangan. Jika Pemkot Yogya ingin meniru Perancis, dan menjadikan kawasan Malioboro seperti di Paris, atau seperti kawasan elite di Masjidil Haram di Makkah maupun Masjid Nabawi di Madinah, tentu membutuhkan perencanaan yang matang dan pembiayaan yang sangat besar. Tak semudah membalik telapak tangan.

Yang penting dicermati ketika Sri Sultan melontarkan kritik keras kepada para pakar dengan memunculkan gagasan segar dalam perspektif spiritual dengan menyebut konsep hamblum minallah atau hubungan indah dan cerdas dengan Sang Pencipta. Juga manakala Sang Raja merujuk konsep “garis imajiner” yang berwawasan hati nurani

tersebut, sesungguhnya telah menegaskan bahwa persoalan yang sesungguhnya terjadi bukan 'hanya' masalah perparkiran dan pertokoan semata, melainkan semacam triger dan ikhtiar bagi munculnya sebuah dialog kebudayaan untuk melahirkan sebuah "konfigurasi budaya baru bagi Mataram". Siapkah para pakar maupun masyarakat memasuki babak baru "dialog kebudayaan" bagi lahirnya "Jagat Baru Yogya yang berwawasan Hati Nurani"? Ataukah kita hanya berkutat tentang konsep fisik saja?

Solusi untuk membereskan kota Yogya adalah solusi kompromi. Titik temu antara persoalan ekonomi, wilayah ekologi, warisan budaya dan nilai-nilai spiritual. Yogya perlu berguru juga pada Kyoto, Yunani, Roma, Moscow, Tibet, Bombay, Budhapest, Wina, Amsterdam, Berlin, Ankara, Barcelona, Baghdad, Teheran, Beirut, Peking, serta sejumlah kota-kota tua di berbagai belahan dunia yang hingga kini masih menyimpan aura spiritual, nilai-nilai budaya dan warisan arsitektur yang menggetarkan. Mau tak mau suka tidak suka, siap tidak siap, semua akan berubah, tak terkecuali Yogya. Tapi perubahan seperti apa yang kita cita-citakan bersama untuk Yogya?

Selebihnya, si vis pacum para bellum. Kalau ingin damai, bersiaplah berperang. q - c

**) HM Nasruddin Anshoriy Ch, Pelaku Budaya, Pengasuh Pesantren Ilmu Giri..*